

PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS BEBAS KORUPSI, OMBUDSMAN KALBAR MINTA PN PONTIANAK ISTIQOMAH

Senin, 25 Februari 2019 - Muhammad Rhida Rachmatullah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Ombudsman Kalbar Agus Priyadi mengatakan menyambut adanya pencanangan [Zona Integritas](#) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Pengadilan Negeri Pontianak kali ini.

Pencanangan dari instansi vertikal ini dalam rangka menjadikan wilayahnya bebas [korupsi](#) dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Adanya pencanangan ini, tinggal kita tunggu saja terhadap komitmen mereka. Komitmen dalam melayani harus mereka kuatkan lagi dan kepada masyarakat kami minta partisipasinya juga.

Apabila ada menemui atau menjumpai yang tidak sesuai prosedur maka dilaporkan pada kami.

Kemudian, pihak pengadilan jangan alergi terhadap pengaduan masyarakat yang ada, karena itu untuk memperbaiki institusi kedepannya.

Kemudian berkaitan dengan WBBM, selama ini banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait penyerahan salinan putusan yang ada.

Komitmen Bmbirokrasi melayani itu, bagaimana salinan setelah putusan itu jangan lama. Itu harus diserahkan secepat-cepatnya seperti di MK, di MK itu satu hari mereka serahkan. Saat ini yang banyak sekali keluhan dari masyarakat mengenai salinan putusan itu.

Mengenai aturan bahwa tidak boleh ada pertemuan antara hakim dan pengurus perkara itu bukan hal baru, itu sudah sejak lama.

Tapi mereka juga yang bisa paham, apakah tidak bertemu dikantor, tapi diluar malah ketemu.

Tapi upaya yang dilakukan kita berikan apresiasi, dan semoga istiqomah. Pengadilan yang baik itu adalah pengadilan tidak berat sebelah, pengadilan yang memutuskan perkara dengan seadil-adilnya serta profesional.

Mudah-mudahan bisa dalam prakteknya tidak bertemu antara hakim dan pengurus perkara, karena kalau bertemu tentunya ada lobi-lobi.

Harus ada realisasi konkret yang dihasilkan, tidak hanya pencanangan semata.